

ABSTRAK

ACTIO PAULIANA PASAL 1341 KUH PERDATA DAN AKIBAT HUKUM DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN (Studi Putusan MA Nomor 89 K/Pdt.Sus-pailit/2019)

Oleh :

IWAN SETYAJI

E1A016271

Penelitian ini membahas tentang perkara MA nomor 89 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Jo nomor 1/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2018/ PN Niaga Mdn. Jo Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn, Irfan Surya harahap selaku kurator menggugat dengan Gugatan *Actio Pauliana*, dengan tujuan agar tanah dan bangunan yang telah dijual oleh BUN HUI dapat dibatalkan dan bisa dimasukkan kedalam budel pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian teks secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan yaitu yang pertama bahwa pertimbangan hukum hakim telah sesuai, karena telah memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai perkara *Actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan secara khusus dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 37 tahun 2004, karena telah terpenuhinya kriteria tersebut sehingga majelis hakim dalam putusnya membatalkan akta jual beli tanah dan bangunan. Kedua akibat dari dibatalkannya akta jual beli tanah dan bangunan yaitu mengembalikan tanah dan bangunan tersebut ke keadaan semula seperti sebelum perjanjian jual beli terjadi, serta tanah dan bangunan tersebut dapat dimasukkan ke dalam budel pailit untuk pelunasan hutang.

Kata Kunci : *Actio Pauliana*, Akibat Hukum, Perkara Kepailitan

ABSTRACT

ACTIO PAULIANA ARTICLE 1341 CIVIL CODE AND THE LEGAL CONSEQUENCES OF CANCELING AN AGREEMENT (Study of Supreme Court Decision Number 89 K/Pdt.Sus-bankruptcy/2019)

By

IWAN SETYAJI

E1A016271

This study discusses the Supreme Court case number 89 K/Pdt.SusPailit/2019. Jo number 1/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2018/PN Niaga Mdn. Jo Number 16/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN Niaga Mdn, Irfan Surya harahap as curator sues with the *Actio Pauliana* lawsuit, with the aim that land and buildings that have been sold by BUN HUI can be canceled and can be included in the bankruptcy budget. The research method used in this study is normative juridical, and the data used in this study is to collect primary, secondary and tertiary legal materials and then analyzed using qualitative normative analysis methods. The data is then presented in the form of text descriptions systematically as a unified whole.

Based on the results of the study, a conclusion was obtained, namely the first that the judge's legal considerations were appropriate, because they had met the criteria to be said to be an *Actio pauliana* case in Articles 41 and 42 of Law no. 37 of 2004, due to the fulfillment of these criteria, the panel of judges in their decision annulled the deed of sale and purchase of land and buildings. The second result of the cancellation of the deed of sale and purchase of land and buildings is to return the land and buildings to their original state as before the sale and purchase agreement occurred, and the land and buildings can be included in the bankruptcy budget for repayment of debts.

Keywords: *Actio Pauliana*, Legal Consequences, Bankruptcy Case